

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH DALAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI SMP PGRI BATUCEPER

Nuraini Kholifiyah Syam¹, Wetri Efita²

^{1,2}Universitas Terbuka

²STMIK Dharmapala Riau

Email: 043374767@ecampus.ut.ac.id

wetri_efita@yahoo.com

3 Desember 2025; Direvisi: 15 Desember 2025; Accepted: 27 Desember 2025

ABSTRAK

Implementasi manajemen keuangan di sekolah memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan manajemen keuangan di sekolah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dan subjek yang terlibat dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, bendahara sekolah, wakil kepala bidang sarana dan prasarana, serta beberapa tenaga pendidik. Tujuan utama dari penelitian ini meliputi perencanaan anggaran yang terarah, identifikasi sumber pendapatan, dan pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga dibahas, disertai dengan partisipasi aktif dari stakeholder seperti orang tua dan masyarakat. Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan yang efektif dapat membangun suasana belajar yang mendukung dan ideal untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan keuangan untuk penyediaan fasilitas di SMP PGRI Batucopeer berjalan lancar. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan telah di terapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan di SMP PGRI Batucopeer. Transparansi serta akuntabilitas publik adalah prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMP PGRI Batucopeer.

Kata kunci: manajemen keuangan, pendidikan, sarana dan prasarana

ABSTRACT

Financial management in schools is important in providing quality educational facilities and infrastructure. This study aims to understand how implementing financial management in schools meets the needs of educational facilities and infrastructure at the Junior High School (JHS) level. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis, and the subjects involved in this study include the principal, school treasurer, vice principal for facilities and infrastructure, and several educators. The main objectives of this study include targeted budget planning, recording sources of income, and management of procurement of facilities and infrastructure. In addition, the importance of transparency and accountability in budget management is also discussed, accompanied by active participation from stakeholders such as parents and the community. Through continuous evaluation and improvement, it is hoped that effective financial management can build a supportive and ideal learning atmosphere to optimize student development. The study results indicate that financial planning and implementation for the provision of facilities at JSH PGRI Batucopeer are running smoothly. The availability of educational facilities and infrastructure has been implemented well in financial management at JHS PGRI Batucopeer. Transparency and public accountability are the principles used in managing school finances at JHS PGRI Batucopeer

Keywords: financial management, education, infrastructure

1. PENDAHULUAN

Merujuk kepada tujuan pendidikan nasional pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk peserta didik menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik diharapkan memiliki akhlak serta kesehatan yang baik, pengetahuan yang memadai, keterampilan yang handal, kreativitas yang tinggi, kemandirian yang kuat, serta mampu menjadi masyarakat yang inklusi dan penuh tanggung jawab. Setiap peserta didik berhak atas pendidikan yang sejalan dalam menggunakan aspirasi dan potensi mereka. Walaupun demikian, kemampuan manajemen sekolah dalam memenuhi tujuan pendidikan juga sangat penting, seperti dalam auran dan manajemen pendidikan pendidikan secara efektif dan efisien dikenal sebagai manajemen keuangan pendidikan. Setiap tahun pelajaran baru memerlukan perencanaan, pengendalian, penerapan, dan hasil yang baik. Perencanaan pengelolaan pelaksanaan dan evaluasi keuangan sekolah sangat penting karena akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dana yang diterima sekolah. Sekolah, terutama sekolah swasta, diwajibkan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang efektif. Kajian teorinya menandakan penerapan manajemen keuangan sekolah sangat penting untuk mengatur semua aktivitas di sekolah (Najihah & Muhammad, 2021). Laporan keuangan memberikan gambaran tentang tindakan masa lalu perusahaan, jadi pengendalian keuangan sangat penting bagi kepala sekolah selaku pimpinan. (Hanafi, 2021). Istilah "sarana" dan "prasarana" digunakan dengan langsung selama proses pembelajaran., dan keadaan ini sangat memprihatinkan di Indonesia, terutama di daerah Kota Tangerang, karena dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan diri peserta didik. Ini terbukti dengan fakta bahwa beberapa sekolah swasta di Kota Tangerang belum sanggup menyempurnakan keperluan sarana dan prasarana pendidikan yang terbaik. Keterampilan untuk mengatur keuangan dengan baik, yang akan berpengaruh pada sarana dan prasarana.

Tujuan dari penelitian ini unuk meneliti keyakinan masyarakat mengenai fasilitas yang memadai di sekolah swasta karena telah dilengkapi oleh pemerintah. Namun faktanya, tidak seluruh sekolah swasta memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan mereka dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengumpulkan responden dengan tiga tujuan yang akan dijawab oleh individu dengan keahlian dalam menerapkan manajemen keuangan dan sarana pendidikan di salah satu sekolah swasta daerah Kota Tangerang. Transparansi dalam pengorganisasian pengelolaan keuangan juga penting untuk mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari orang lain, seperti orang tua dan pemerintahan (Khoeriyah, Permana, 2022). Sangat penting bagi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sekolah SMP

menggunakan manajemen keuangan untuk mendapatkan sarana dan prasarana. Apakah dana telah dialokasikan dengan baik. Bagaimana perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dilakukan di institusi pendidikan dan apakah terjadi kendala saat melakukannya. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana sekolah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikannya. Selain itu, pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek yang menghambat pelaksanaan keuangan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertempat di sekolah SMP PGRI Bataceper Kota Tangerang. Didasarkan pada pertimbangan bahwa SMP PGRI Bataceper cukup representatif dan memiliki relevansi yang khusus untuk kepentingan penelitian maka peneliti memilih lokasi ini untuk penelitiannya. Penelitian ini melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, wakil kepala bidang sarana dan prasarana, serta sejumlah tenaga pendidik. Peneliti akan menggunakan metode ini untuk mengkaji manajemen keuangan sekolah terkait pembangunan dan prasarana secara sistematis dan menganalisis secara mendetail terhadap penganggaran pada Sekolah Menengah Pertama PGRI Bataceper, yang terletak di Kota Tangerang. Penelitian ini mengingatkan bahwa secara umum, sekolah swasta khususnya SMP PGRI Bataceper diharuskan untuk lebih kreatif dalam memilih cara pengelolaan keuangan sekolah agar satuan pendidikan dapat bertahan dan bahkan tidak kalah bersaing dalam memenuhi sarana dan prasarana dengan sekolah swasta sekitar yang pada dasarnya sama-sama menerima dana dari pemerintah berupa dana BOP dan BOS dalam hal kualitas hasil pendidikannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian manajemen keuangan sekolah

Perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dilakukan dengan berbagai tujuan atau pengelolaan fungsi keuangan disebut manajemen keuangan (Kasmir, 2010). Manajemen keuangan sangat penting untuk mengatur program pendidikan. Merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), melaksanakan (*actuating*), mengawasi dan mengendalikan (*contorlling*) adalah beberapa tahap dari proses manajemen keuangan. Administrasi keuangan dibagi menjadi tiga fungsi: otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Kepala sekolah memiliki hak untuk memberikan instruksi terkait pembayaran untuk setiap kegiatan yang dilakukan sepadan dengan otorisasi yang telah ditentukan. Otoritas juga berwenang menetapkan kebijakan tentang bagaimana uang digunakan dan diterima. Mereka yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan,

serta mengeluarkan uang atau dokumen berharga lainnya disebut sebagai bendahara. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan. Keuangan diawasi oleh seorang bendaharawan yang melakukan pembukuan sesuai dengan peraturan. Karena faktor pendukung kesuksesan sistem manajemen keuangan sekolah bergantung pada manajemen sekolah dan kepemimpinan sekolah yang kuat (Janah, dkk, 2024).

- 3.2 Perencanaan keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMP PGRI Bataceper Perencanaan adalah langkah pertama dalam menentukan kebutuhan di sekolah. Ini mengatur proses apa yang akan dilakukan, dimana, kapan, dan selama berapa lama. Perencanaan keuangan sekolah merupakan suatu proses yang melibatkan penentuan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan akademik serta memperoleh tujuan yang diinginkan oleh sekolah. Perencanaan keuangan melibatkan penjabaran rencana dalam bentuk proposal untuk setiap aspek kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang berkaitan dengan anggaran (Handoko & Tukiran, 2022). Perencanaan keuangan sekolah berarti mengatur dana untuk mendukung pendidikan dan mencapai tujuan sekolah. Perencanaan ini mencakup penjabaran rencana ke dalam dana tahunan dan mencakup sejumlah sumber dana yang dialokasikan untuk memperoleh tujuan yang berkaitan dengan anggaran.

3.2.1 Sistem penyusunan anggaran

Sistem penyusunan anggaran yang digunakan oleh SMP PGRI Bataceper sangat kompleks. Ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran dimulai dengan meninjau usulan program dari berbagai sudut pandang. Rekomendasi ini diterima dari berbagai pihak, termasuk para tenaga pendidik, staf sekolah, dan lainnya. Hal ini memudahkan sekolah untuk menganalisis kebutuhan peserta didik.

3.2.2 Penyusunan anggaran

Istilah “manajemen anggaran sekolah” merujuk pada semua kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja untuk membantu mencapai tujuan sekolah dengan lebih efektif dan efisien. Anggaran SMP PGRI Bataceper menggambarkan perkiraan kinerja yang akan diperoleh selama jangka waktu tertentu, yang ditunjukkan dalam parameter keuangan. Semua kegiatan pendidikan dimasukkan ke dalam rencana yang disusun secara sistematis dan disampaikan pada satuan keuangan yang akan datang. Dalam buku Manajemen pendidikan, Lipham menyebutkan empat langkah utama: merencanakan,

mempersiapkan, mengelola dan menentukan pelaksanaan anggaran.

Langkah-langkah yang diambil untuk menyusun anggaran dalam menanggulangi keperluan sarana dan prasarana satuan pendidikan pada SMP PGRI Batuceper adalah seperti berikut ini: Pertama, merencanakan anggaran. Selanjutnya, tim penyusun anggaran yang beranggotakan kepala sekolah, bendahara sekolah, staf, wakil kepala bidang, dan program kerja harus dicatat terlebih dahulu oleh setiap kordinator yang ada pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk menindaklanjuti program kegiatan pada tahun pembelajaran selanjutnya. Kedua, mempersiapkan anggaran disusun berdasarkan skala prioritas pelaksanaan. Perencanaan mencakup semua acara yang akan dilakukan selama satu tahun. Semua kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan lembaga dan peserta didik. Dalam rapat tahunan, semua rencana kegiatan peserta didik dibahas dengan mempertimbangkan tingkat prioritas kegiatan yang memenuhi kebutuhan sekolah. Anggaran yang dialokasikan di SMP PGRI Batuceper akan diprioritaskan untuk hal-hal yang mendukung pembelajaran peserta didik, seperti ketersediaan sarana dan prasarana. Ini sesuai dengan analisis serta diskusi peneliti sebelumnya tentang temuan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang bekerja di lapangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan skala prioritas sangat penting saat menyusun anggaran SMP swasta untuk sarana dan prasarana. Ketiga mengelola pelaksanaan anggaran, yang berarti program sekolah melihat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan keuangan dalam upaya pemenuhan sarana. Ada tiga kategori program yaitu: Program jangka pendek mencakup renovasi mendadak serta pemeliharaan yang terus menerus, seperti pemeliharaan kelas, kebersihan, dan pengadaan alat tulis kantor. Program jangka menengah mencakup perbaikan gedung sekolah skala besar, seperti pemeriksaan kelas, perbaikan bangunan kelas, dan perbaikan gedung satuan pendidikan. Program jangka panjang, seperti pembangunan, yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. SMP PGRI Batuceper memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang mencantumkan program jangka panjang. Keempat menentukan apa yang diperlukan dalam menjalankan program. Kebutuhan untuk menunjang program untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, seperti peningkatan biaya bahan baku dan gaji untuk tenaga pendidik, staf, tenaga kebersihan, keamanan, dan tukang, dibahas secara rinci dalam program kerja sebelumnya. Ini sesuai dengan

analisis dan diskusi peneliti sebelumnya tentang hasil dari pengamatan serta wawancara peneliti di lapangan tentang bagaimana program dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

SMP PGRI Bataceper menggunakan teori penyusunan anggaran dan menggunakan pendekatan umum sistem *planning, organizing, actuating, and controlling*. Metode ini berfokus pada tujuan dan rencana program secara khusus dan umum, serta menganalisis jumlah dana yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Sesuai dengan analisis dan diskusi peneliti di atas, bahwa proses penyusunan anggaran di SMP PGRI Bataceper dimulai dengan membuat program kegiatan, melakukan analisis kebutuhan anggaran, dan akhirnya menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

Setelah melakukan analisis dan perhitungan yang akurat tentang jumlah dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, SMP PGRI Bataceper melakukan perencanaan keuangan. Selanjutnya, diputuskan siapa yang akan memberikan dana untuk perencanaan keuangan. Sekolah swasta memperoleh pendana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dana komite serta dana sukarela partisipasi masyarakat, yang tidak terbatas. Sekolah dapat melakukan sosialisasi dengan komite sekolah jika dana pemerintah tidak memadai.

Hal ini sesuai dengan apa yang dibahas dan dievaluasi oleh peneliti tentang temuan dari observasi dan wawancara di lapangan. Peneliti menemukan bahwa di SMP PGRI Bataceper, penyusunan anggaran dilakukan melalui berbagai sumber dana yang tercantum dalam RKAS. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dibuat berdasarkan hasil dari RAPBS ini. Rencana ini dibuat selama satu tahun pelajaran.

3.3 Pelaksanaan keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMP PGRI Bataceper

Pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk menyediakan sarana dan prasarana di SMP Swasta terdiri dari dua kegiatan berikut:

3.3.1 Penerimaan

SMP PGRI Bataceper mendapatkan sarana dan prasarana dari pemerintah, komite dan masyarakat. Pemerintah memberikan dana rutin kepada SMP PGRI Bataceper pada bentuk BOS dan BOP. BOS dan BOP diberikan kepada sekolah

untuk membantu membiayai peserta didik untuk membeli, menjaga, dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Kebutuhan peserta didik akan menentukan jumlah biaya partisipasi tidak mengikat. Seperti yang telah diketahui, alokasi dana dari pemerintah masih belum memadai untuk menutupi keperluan sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemeliharaan fasilitas tersebut membutuhkan biaya yang besar. Komite sekolah telah menyetujui jumlah uang yang diperlukan.

3.3.2 Pengeluaran

Pembelian sarana dan prasarana di SMP PGRI Batuceper dilakukan sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang berlaku di satuan pendidikan. RKAS dalam pengadaan sarana serta prasarana perlu memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan. Hubungan perlu dibangun dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab di lapangan untuk menyediakan sarana dan prasarana. Seberapa banyak satuan pendidikan yang tidak dapat mencapai tujuan akademik mereka semata-mata karena masalah keuangan untuk membayar tenaga pendidik serta membeli keperluan yang berguna untuk membantu peserta didik mendapatkan fasilitas yang baik (Rusdiana, 2019). Anggaran sekolah harus disesuaikan dengan persetujuan sekolah sebelum dialokasikan untuk hal-hal seperti barang habis pakai; pembayaran bulanan untuk operasional sekolah seperti listrik, WiFi, PAM, pembelian computer, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, penggajian tenaga pendidik, atap bocor AC yang rusak dan lainnya. Setiap pengeluaran harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dengan memperlihatkan transaksi. Dalam situasi seperti ini, wakil kepala bidang sarana dan prasarana harus memberikan laporan serta diserahkan kepada bendahara untuk memperlihatkan pembayaran kepada pihak yang telah membayar barang tersebut. Semua pengeluaran dana dilaporkan kepada pemerintah melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Bendahara satuan pendidikan harus mahir menggunakan aplikasi pelaporan keuangan ini. Anggaran yang telah dibuat harus memastikan semua dana yang masuk dan keluar sesuai. Hasil penelitian tentang proses pelaksanaan keuangan di SMP PGRI Batuceper menunjukkan bahwa komite, orang tua, alumni, dan pemerintah memberikan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana. SMP PGRI Batuceper menggunakan pengelolaan dana yang berbeda untuk menyediakan sarana dan prasarana. Ini

menunjukkan bahwa sekolah bekerja secara mandiri, seperti memperbaiki dan memelihara ruang kelas. Sumber daya manusia yang baik, kerja sama yang efektif, dan penggunaan teknologi informasi akan memastikan manajemen keuangan yang efektif untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

Tenaga pendidik di SMP PGRI Bataceper bertanggung jawab untuk pelaksanaan keuangan. Mereka selalu melakukan BIMTEK, pembagian tugas dengan baik, dan menggunakan teknologi, seperti yang terlihat dalam laporan arus keluar masuk keuangan, yang sebagian besar menggunakan aplikasi komputer.

3.4 Faktor pendukung keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMP PGRI Bataceper

Dalam konteks implementasi manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMP PGRI Bataceper, kita perlu memahami baik faktor-faktor yang dapat membantu maupun menghambat proses tersebut. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen kepala sekolah terhadap manajemen sekolah adalah komponen yang mendukung pemetaan sistem manajemen keuangan sekolah. Dengan dukungan kepala sekolah, para pegawai akan merasa didorong untuk mengadopsi perubahan. Pelatihan dan pengembangan pegawai yang tepat untuk staf sekolah tentang penggunaan sistem manajemen keuangan adalah faktor penting untuk suksesnya implementasi. Dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka, staf akan lebih siap untuk menggunakan sistem tersebut. Fasilitas yang mendukung dan memadai memungkinkan implementasi sistem manajemen keuangan berjalan lancar.

Ketersediaan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan mendukung pengelolaan keuangan yang efisien. Kesadaran akan manfaat yang diberikan oleh sistem manajemen keuangan, seperti transparansi yang lebih besar, pengelolaan anggaran yang lebih efisien, dan pelaporan yang lebih akurat, dapat meningkatkan motivasi untuk mengadopsi perubahan. Dukungan dari komite, komunitas sekolah, termasuk dewan sekolah, orang tua peserta didik, dan staf sekolah sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses perencanaan dan implementasi akan memperkuat dukungan terhadap perubahan tersebut.

3.5 Faktor penghambat keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMP PGRI Bataceper

Wawancara telah dilakukan dengan kepala sekolah dan bendahara SMP PGRI Bataceper, menunjukkan bahwa beberapa masalah keuangan menghambat pemenuhan

sarana dan prasarana sekolah. Faktor-faktor tersebut termasuk kekurangan dana dan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Selain itu, orang tua serta wali peserta didik menjadi penghalang. Beberapa peserta didik yang menyumbangkan dana komite sekolah tidak memberikan iuran secara teratur setiap bulan atau bahkan sama sekali tidak memberikan iuran. Hal ini sangat mengganggu pengelolaan keuangan sekolah di SMP PGRI Bataceper, termasuk anggaran BOS, BOP, dan komite satuan pendidikan. Tentu saja, hal tersebut juga berdampak pada tidak tercukupinya anggaran BOS dan BOP untuk sekolah di SMP PGRI Bataceper sesuai dengan persetujuan anggaran yang telah disetujui. Jika perencanaan dilakukan di luar rencana yang telah ditetapkan, hal itu dapat menghambat pengelolaan keuangan sekolah. Jika perencanaan telah sesuai dengan rencana yang sudah disusun, hal tersebut akan memberikan kemudahan serta mendukung pengelolaan keuangan di SMP PGRI Bataceper.

3.6 Pertanggungjawaban (akuntabilitas) keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMP PGRI Bataceper

Tanggung jawab keuangan SMP PGRI Bataceper terkait dengan semua tindakan yang dilakukan oleh setiap orang, pokok dalam penggunaan uang yang telah dipercayakan kepada mereka. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam pengelolaan dana yang ditetapkan untuk pembangunan gedung dan infrastruktur sekolah sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban pengendalian keuangan sekolah dicatat dalam laporan pengelolaan keuangan yang disusun oleh bendahara satuan pendidikan setiap bulan, tiga bulan, serta pada akhir tahun. Kepala satuan pendidikan, yayasan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah diharapkan untuk melaporkan pemanfaatan dana-dana tersebut.

Di SMP PGRI Bataceper, laporan pertanggungjawaban dibuat pada akhir tahun kalender akademik dengan bantuan wali peserta didik. Pada penutupan tahun ajaran, RAPBS direncanakan untuk berfungsi sebagai sarana pendidikan dengan dukungan dari dewan sekolah, yayasan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan sekolah, melalui ketentuan perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, SMP PGRI Bataceper telah melaksanakan tanggung jawab keuangan sekolah dengan baik melalui penerapan metode penyaluran keuangan kepada kepala sekolah.

Laporan pertanggungjawaban tahunan ini disimpan dengan aman di sekolah oleh wali peserta didik. Tanggung jawab ini juga merupakan salah satu aspek pemantauan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan serta wewenang yang tersedia. Laporan

bulanan dan setiap 3 bulan, khususnya untuk Dinas Pendidikan Kota, disusun terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana Forum Pendidikan.

Pembiayaan yang mencakup seluruh kegiatan sekolah berpengaruh pada laporan keuangan sekolah. Laporan ini disusun berdasarkan total pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Kepala sekolah dan bendahara sekolah membuat laporan ini, yang dipertanggungjawabkan kepada kementerian pendidikan nasional. Setelah laporan dikirim, tanggung jawab berikutnya adalah revisi laporan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Evaluasi kepala sekolah dan pengawasan Yayasan menunjukkan transparansi.

Akuntabilitas ini diukur dengan kualitas kinerja dalam menyelesaikan tugas yang memungkinkannya untuk meraih akhir yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan rencana serta aturan yang sedang diterapkan, penggunaan dana pada institusi pendidikan dapat dipertanggungjawabkan (Puarada, N. A. 2016). Maksud dari akuntabilitas dalam pembiayaan satuan pendidikan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, meningkatkan kinerja lembaga dan tingkat kenyamanan stakeholder terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan, dan membuat penyelenggara pendidikan bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pendanaan yang dikumpulkan oleh pemerintah, orang tua, serta masyarakat (Sutedjo, S. 2009). Dengan menggunakan akuntabilitas ini, dikelola satuan pendidikan memiliki tanggung jawab yang dapat diemban atas pengeluaran mereka. Wali peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Pengelola satuan pendidikan harus memberikan laporan keuangannya kepada pihak berwenang pendidikan secara berkala.

Empat pilar utama diperlukan untuk membangun akuntabilitas manajemen keuangan satuan pendidikan: 1) Penyelenggaraan manajemen keuangan pada lembaga satuan pendidikan harus transparan mengenai cara mereka memperoleh sumber untuk pembiayaan pendidikan dan melibatkan semua pihak dalam pengelolaan dana lembaga tersebut; 2) Setiap lembaga pendidikan perlu memiliki standar kinerja pengelolaan keuangan yang terukur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban mereka, seperti otorisator, ordonator, dan bendaharawan sekolah; 3) Penting untuk ada partisipasi yang saling mendukung guna menciptakan suasana yang mendukung pengelolaan keuangan satuan pendidikan dilakukan dengan langkah yang sederhana, terjangkau, serta dilengkapi dengan pelayanan yang cepat; dan 4) Peraturan mengenai pengelolaan keuangan yang memberikan keputusan hukum serta administrasi yang baik. untuk

menerapkan kebijakan publik dengan memaksimalkan layanan pendidikan (Shafratunnisa, F, 2016).

4. SIMPULAN

Penyusunan anggaran keuangan sekolah perlu dikelola oleh pihak sekolah untuk memastikan bahwa pemasukan dan pengeluaran dana dapat diatur dengan baik dan tepat. Sehingga sarana dan prasarana satuan pendidikan bisa disediakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), dan pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) adalah beberapa cara manajemen keuangan sekolah dilakukan. Sekolah harus menggunakan manajemen terbuka sebagai dasar pengelolaan keuangan mereka. Ini akan memungkinkan sekolah untuk memenuhi tugas yang diberikan dalam peningkatan lembaga dan fasilitas sekolah dan mengingat pentingnya menjaga seluruh fasilitas saat ini dan di masa depan.

Karena manajemen keuangan sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar, penganggaran dana di alokasikan sesuai dengan keperluan setiap bidang di kegiatan sekolah. Sebagai pemimpin lembaga pendidikan, kepala sekolah perlu memahami dan menguasai pengelolaan sekolah, terutama dalam hal keuangan. Bendahara sekolah seharusnya individu yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan serta latar belakang pendidikan yang sesuai. Tanggung jawab utama seorang pengajar adalah mendidik dan mengajar siswa, jadi mereka tidak diperoleh untuk posisi bendahara sekolah. Pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas satuan pendidikan dengan menambah anggaran BOS dan BOP untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. Wali peserta didik diharapkan dapat membayar biaya sekolah secara teratur setiap bulannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, Lamatenggo, N. & Sumar W. T. (2017). *Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan*. Widya Padjadjaran Anggota IKAPI JABAR.
- Aslichati, L, Prasetyo, B.H.I, Irwana, P. (2022). *Metode penelitian sosial*. Penerbitan Universitas Terbuka.
- Rusdiana, A. & Wardija. (2022). *Manajemen keuangan sekolah: Konsep prinsip dan aplikasinya di sekolah/madrasah*. Arsad Press.
- Hanafi, M.M. (2021). *Manajemen*. Penerbitan Universitas Terbuka.
- Handoko, C. (2022). Manajemen kepala sekolah/madrasah dalam sistem pengelolaan keuangan. *Jurnal An-Nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 8(01).
- Iskandar, J. (2019). Implementasi sistem manajemen keuangan pendidikan. *Idaarah*, 3(1), 114- 123.
- Janah, D. I., Imanda, F. A., Maulana, M. R., & Trihantoyo, S. (2024). Pemetaan sistem manajemen keuangan di sekolah. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan*

Ekonomi, 5(3), 133-143.

Khoeriyah, S. M., & Permana, H. (2022). Manajemen keuangan sekolah di SMP Al-Muslih Karawang. *PeTeKa: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran*, 5 (1), 15–20.

Komariah, N. (2018). Konsep manajemen keuangan pendidikan. *Jurnal Al-Afkar*, 6(1), 67–93.

Kusyudiyanto, N., Santosa, A. B., & Hidayati, D. (2023). Strategi manajemen pembiayaan sekolah swasta dalam menciptakan sekolah unggulan di SMK Muhammadiyah 3 Bandung. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1834-1857.

Masbullah, As, A. B., Mudzafaroh, N., Hariyadi, A., & Nurdiana, D. D. (2023). Implementasi manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. *Al- Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(1), 92-101.

Muhaimin, M. A., Suti'ah, Prabowo, S. L. (2015). *Manajemen pendidikan (aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah/madrasah)*. Prenada Media.

Najihah, I., & Muhammad, S. H. (2021). Konsep manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan islam perspektif Al Qur'an dan hadis. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 223–239. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v5i2.21616>.

Noor, T. (2018). Rumusan tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 2(01).

Nurstalis, N., Ibrahim, T., & Abdurrohman, N. (2021). Peran manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Islam Cendekia Cianjur. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 6(1), 63-76.

Sari, Y. P., Rachmawati, D. W., Rahmawati, S., Solissa, F., Niam, M. F., Purnamasari, A., Wadji, F., Khosiin, K., Nuryani, H. S., Nurmalasari, I., & Lindriany, J. (2024). *Pengelolaan keuangan pendidikan*. Widina Media Utama.

Sukma, A. H. B., & Nasution, A. M. (2022). Manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Bekasi. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 45-57. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.226>.

Suriyanti, S. (2023). *Buku referensi: Manajemen keuangan*. Eureka Media Aksara.